

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani kelapa sawit sering dibenturkan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan bagi pihak atau usaha mereka, apalagi tentang hal sistem pemasaran, harga atau pengelolaan. Namun terdapat permasalahan yaitu bagi pihak yang memiliki modal kecil menjadi korban dari pengusaha yang memiliki modal besar. Solusi terkait hal tersebut bisa dicapai apabila petani bisa berhimpun dalam kekuatan secara bersama, seperti halnya membuat kelembagaan pertanian seperti kelompok tani. Tujuan dibentuknya kelompok tani supaya petani dapat menjalankan usaha taninya secara bersama-sama sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha tani yang dijalankan oleh anggota dan kelompok dengan beberapa prinsip kehidupan berkelompok diantaranya adalah prinsip partisipatif (Mardikanto, 2020).

Salah satu cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih mudah, adalah dengan berkelompok. Bergabung dengan kelompok tani dapat menjadi sebuah solusi dalam menghadapi masalah atau kendala yang dialami oleh petani kelapa sawit. Kelompok tani merupakan petani yang bergabung secara formal dengan adanya kebiasaan yang sama terhadap kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, dan sumberdaya), keserasian, keakraban, serta saling mempercayai dan mempunyai kepentingan bersama serta mempunyai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Terbentuknya kelompok tani merupakan suatu usaha dalam melakukan pembangunan pertanian yang berfungsi memberikan wadah yang kokoh guna memperlancar hasil pertanian dan merupakan naungan untuk menguatkan kerjasama diantara para petani dalam kelompok tani menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan (Mamahit, 2016).

Coleman (1999), mengatakan *human capital* selain sebagai pengetahuan dan keterampilan adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain. Kemampuan ini akan menjadi modal penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Modal yang demikian ini disebut

dengan “modal sosial” (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Fukuyama (2002), modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan sosial (*networking*). Ketiga unsur tersebut sangat berperan penting. Modal sosial yang terjalin antar petani dengan perusahaan melalui kemitraan melalui sistem KKPA dengan PT. Musim Mas yaitu dengan kesepakatan dan bekerja sama dalam melakukan pengelolaan lahan, tanam hingga perawatannya sampai bisa diproduksi yang diserahkan kepada pihak PT. Musim Mas.

Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat menjadi dorongan serta mensejahterakan masyarakat bahkan dapat meminimalisir peluang konflik. Kelompok yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif dalam mencapai sebuah target dan begitu juga sebaliknya (Kholifa, 2016).

Tabel 1. 1 Produksi Perkebunan Provinsi Riau (Ton) Tahun 2018 - 2019

Kabupaten Kota	Produksi Perkebunan (Ton) Kelapa Sawit	
	2018	2019
Riau	7 683 535,00	7 466 260,00
Kuantan Singingi	452 218,00	450 804,00
Indragiri Hulu	286 243,00	469 273,00
Indragiri Hilir	733 009,00	731 009,00
Pelalawan	1 339 609,00	1 340 009,00
Siak	1 193 290,00	1 098 665,00
Kampar	955 753,00	1 222 465,00
Rokan Hulu	1 195 460,00	1 195 460,00
Bengkalis	334 066,00	334 066,00
Rokan Hilir	813 834,00	813 832,00
Kepulauan Meranti	0,00	0,00
Pekanbaru	31 219,00	36 612,00
Dumai	82 122,00	41 195,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (*Statistics of Riau Province, 2023*)

Wilayah Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten, akan tetapi dari Kabupaten yang ada, Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang memiliki jumlah produksi yang paling banyak dengan jumlah 1.339.609,00 Ton dari Tahun 2018 dan 1.340.009,00 Ton di Tahun 2019 dan disusul oleh Kabupaten Kampar dengan jumlah 955.753,00 Ton di Tahun 2018 dan 1.222.465,00 Ton di tahun 2019, melihat banyaknya jumlah produksi kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan, Riau. Tanaman sawit perlu dikelola dengan baik agar sawit dapat produktif (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau telah banyak membawa perubahan besar terhadap ekonomi masyarakat Provinsi Riau khususnya, di daerah pedesaan yang berdampak ganda pada perekonomian wilayah, terutama dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Dimulai dari pemilikan lahan pribadi hingga suatu program dengan konsep pemerataan kepemilikan kebun berupa kerja sama kemitraan dengan sistem KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) (Aulia, 2013).

Program KKPA adalah program pemerintahan dalam membantu permodalan bagi petani untuk merencanakan niat tersebut maka dibentuk suatu wadah Koperasi pada tahun 1995, yang anggotanya adalah gabungan dari koperasi untuk desa yang dibangun menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). KUD adalah lembaga ekonomi desa wilayah plasma yang merupakan wadah petani peserta/perawatan, panen, transportasi dan penjualan hasil produksi. KUD tersebut berfungsi sebagai penyediaan kebutuhan petani peserta, mengatur hubungan kerja sama dengan petani peserta, kelompok tani dan perusahaan inti dan lainnya (Aulia, 2013).

Koperasi petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit rakyat adalah koperasi primer yang telah berbadan hukum sebagai mana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pelaksanaa kemitraan, terlebih dahulu koperasi harus membuat perjanjian Kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit untuk anggota secara tertulis dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit. Untuk memperoleh dana KKPA

koperasi harus mengajukan permohonan kepada bank pelaksana melalui atau bekerjasama dengan perusahaan inti sebagai mitra KKPA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui koperasi di desa dengan berdasarkan konsep kemitraan, yaitu perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, bertanggung jawab dan saling ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma. Dengan adanya kemitraan akan membantu memperbesar skala usaha dan meningkatkan efisiensi produksi perusahaan (Aulia, 2013).

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa bentuk model KKPA dan salah satunya diterapkan di Desa Pangkalan Lesung yang dibangun oleh PT. Musim Mas dengan nama KUD Rawa Tengkuluk. KKPA KUD Rawa Tengkuluk memiliki lahan luasan 401 ha dengan tahun tanam 2005. Pemilik kebun program KKPA di KUD Pangkalan Lesung yaitu sebanyak 200 KK (Kartu Keluarga) dengan rata-rata kepemilikan lahan kebun seluas 2Ha/KK (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023).

Pihak PT. Musim Mas membangun koperasi bernama KUD Rawa Tengkuluk di Lingkungan Pangkalan Lesung, yang tujuannya mengkoordinir semua kebun kelapa sawit masyarakat diluar kebun plasma dan diluar HGU PT. Musim Mas yang luasannya mencapai ribuan hektar, yang dibeli oleh PT. Musim Mas dengan harga standart Pemprov Riau (Badan Pusat Statistik Provinsi, 2023).

Menurut Blakeley dalam Suharto (2005) KKPA memiliki organisasi khusus dengan menempatkan petugas penyuluh untuk mendampingi dan membimbing petani plasma sehingga pengelolaan kebun berjalan dengan baik. Pembangunan sosial telah dikaitkan dengan konsep modal sosial. Elemen-elemen modal sosial seperti kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya

partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Pada tahun 1975 dibentuk berbagai pola pengembangan, salah satunya KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya) pada tahun 1993. Pada tahun 1975 dibentuk berbagai pola pengembangan, salah satunya KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya) pada tahun 1993.

Pemerintah mengupayakan pengembangan subsector perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dengan jalan meningkatkan luas areal kelapa sawit, pemberian paket kredit, peningkatan penanganan produksi kelapa sawit melalui koperasi serta jaminan harga kelapa sawit. Upaya pemerintah ini sesuai dengan reorientasi pengembangan subsector perkebunan dari usaha tani tradisional kearah usahatani maju yang berbasis agribisnis secara utuh. Pada kenyataanya, perkebunan rakyat masih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar nasional swasta, baik secara luas areal tanaman, hasil produksi dan pendapatan.

Hadirnya Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi petani plasma peserta KKPA. Adapun tujuan dari KKPA adalah menyediakan fasilitas permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani sekaligus untuk mengembangkan koperasi.

Tujuan dikeluarkannya skim KKPA karena pemerintah menilai permodalan anggota koperasi primer tidak kuat. Dalam perkebunan besar kelapa sawit, skim KKPA tentu ditujukan kepada KUD yang bermitra dengan perusahaan inti. Hal ini merupakan keharusan, karena skim KKPA mewajibkan pola inti plasma. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peserta plasma, program KKPA sangat dipengaruhi oleh pola kerjasama/kemitraan yang dibangun antara perusahaan inti dan plasma yang meyangkut pengolahan lahan, penyediaan bibit, penanaman bibit, pemeliharaan, pemanenan dan terakhir pengangkutan TBS. dimana semua biaya kegiatan di atas harus dibayar plasma secara cicilan setiap bulannya kepada perusahaan inti melalui sarana koperasi (Sunarko, 2009).

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Abdulsyani, 1994).

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu. Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut Muhammad jafar hafshah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling

membutuhkan dan saling membesarkan. Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil (Hafsah & Muhammad Jafar, 2000).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan adanya penelitian terkait mengenai modal sosial di PT. Musim Mas dengan tujuan untuk mengetahui mengenai apa saja jenis dari modal sosial serta pemanfaatan dari modal sosial koperasi perkebunan dengan perusahaan PT. Musim Mas dalam KKPA. Dalam mengelola tanaman kelapa sawit yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, lingkungan, maupun perusahaan itu sendiri. Atas dasar permasalahan tersebut, untuk itu peneliti mengambil judul Modal Sosial Koperasi Perkebunan Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan modal sosial antara Perusahaan, KKPA dengan Petani?
2. Apa saja bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Perusahaan dengan

Petani melalui KKPA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan modal sosial antara Perusahaan, KKPA dengan Petani.
2. Untuk mengetahui bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Perusahaan dengan Petani melalui KKPA.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai jalan untuk mengetahui dan memahami modal sosial koperasi dengan perusahaan perkebunan serta memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh derajat sarjana jurusan Sosial Ekonomi Pertanian INSTIPER Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi koperasi dan perusahaan untuk menjadi evaluasi kinerja perusahaan dan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya kelompok tani kredit koperasi primer (KKPA) dalam memanfaatkan modal sosial serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah pengelolaan tanaman kelapa sawit anggotanya.